

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki dua tujuan utama dalam pengelolaan perusahaannya, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945 dengan tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial. Dalam tujuan yang bersifat ekonomi, BUMN dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis agar tidak dikuasai pihak-pihak tertentu. Bidang-bidang usaha yang menyangkut kepentingan hidup orang banyak, seperti perusahaan listrik, minyak dan gas bumi seyogyanya dikuasai oleh BUMN. BUMN secara umum belum menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Perolehan laba yang dihasilkan masih sangat rendah. Maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diperlukan tata perencanaan dan kelola perusahaan yang baik yang dikenal dengan good Corporate Governance (GCG).

Menurut Utama (2005) GCG adalah sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) seperti kreditor, pemasok asosiasi bisnis, konsumen, pekerja pemerintah dan masyarakat luas. Dengan demikian konsep ini dengan cepat diterima oleh masyarakat luas bahkan kinerja

saham suatu perusahaan kind ditentukan sejauh mana keseriusannya menetapkan GCG.

Konsep GCG muncul sebagai upaya untuk mengatasi perilaku manajemen yang mementingkan diri sendiri dengan menciptakan mekanisme dan alat kontrol untuk memungkinkan terciptanya sistem pembagian untung dan kekayaan yang seimbang bagi stakeholders dan menciptakan efisiensi bagi perusahaan. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder* (Sutedi, 2012). Suatu hal dimana secara mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah disebut sebagai sistem GCG.

Sistem GCG memberikan Struktur yang menetapkan obyektif perusahaan dan peralatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan, serta sistem monitoring dan untuk mengukur kinerja (Sutedi, 2012). Maka sistem ini mengatur dengan jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban pihak yang terkait dengan pelaksanaan suatu korporasi bisnis, salah satunya yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal dalam struktur kepemilikan.

Struktur kepemilikan itu sendiri merupakan komposisi kepemilikan atas saham perusahaan yang berasal dari pihak internal maupun pihak eksternal

dan biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Secara umum, terdapat dua indikator struktur kepemilikan, yakni kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Besarnya persentase pada struktur kepemilikan menunjukkan adanya kewenangan pemilik untuk ikut andil dalam hal menentukan arah kebijakan serta mengendalikan jalannya perusahaan, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, struktur kepemilikan dianggap penting didalam perusahaan.

Kepemilikan institusional itu sendiri merupakan proporsi kepemilikan saham oleh investor institusional yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional. Sedangkan Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan (dewan direksi dan dewan komisaris) yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen Primadhanny (2016). Kepemilikan saham oleh manajer akan dapat memotivasi peningkatkan kinerja dalam pengelolaan perusahaan. Kepemilikan saham oleh manajerial, diharapkan manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan para principal karena manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan nantinya dapat meningkatkan kinerja keuangan (Eforis, 2017).

Kinerja keuangan dalam hubungan struktur kepemilikan tersendiri menurut Tarigan (2017) adalah merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga perusahaan dapat melakukan penilaian kinerja tentang baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan

prestasi kerja dalam periode tertentu. Penilaian kinerja keuangan suatu perusahaan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para pemegang saham dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan.

Penilaian kinerja perusahaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari proses pengambilan keputusan manajemen, tentang hal yang kompleks karena menyangkut efektivitas pemanfaatan modal dan efisiensi dari kegiatan perusahaan yang menyangkut nilai dari berbagai tuntutan yang timbul terhadap perusahaan (Eforis, 2017). Dalam kinerja keuangan harus diimbangi dengan perencanaan keuangan yang baik akan dapat memakmurkan pemegang saham yang berada pada sebuah struktur kepemilikan perusahaan.

Akan tetapi dalam teori keagenan Jensen and Meckling (1976) struktur perusahaan antara kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial sering kali terjadi perbedaan kepentingan yang pada akhirnya timbul konflik. Shleifer & Vishny (1997) menyatakan bahwa konflik terjadi antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Menurut Jensen and Meckling (1976) Pemegang saham mayoritas bertindak demi kepentingan pribadi dengan mengorbankan pemegang saham minoritas sehingga kinerja perusahaan akan menurun, yang akhirnya struktur kepemilikan dapat berpengaruh dalam kebijakan penentuan struktur modal.

Struktur Modal tersendiri merupakan perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri, Sartono (2011). Modal asing dalam hal ini adalah utang jangka panjang maupun jangka pendek

sedangkan modal sendiri terbagi atas laba ditahan dan penyertaan kepemilikan perusahaan (Mujariyah, 2016). Struktur modal menunjukkan proporsi penggunaan hutang dengan modal sendiri untuk membiayai operasional perusahaan, yang akan mendorong perusahaan untuk menentukan proporsi modal yang akan digunakan.

Menurut Sugiarto (2009) dalam menentukan proporsi modal yang akan digunakan perusahaan, kebijakan mengenai struktur modal berperan penting dalam kegiatan operasional dan kemajuan perusahaan. Proporsi modal yang tinggi dari struktur modal akan memiliki kekuasaan dan wewenang dalam penentuan kebijakan struktur modal. Akan tetapi struktur modal perlu dilakukan analisis untuk membuat keputusan yang efektif karena baik buruknya struktur modal akan berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Kinerja keuangan perusahaan bisa bernilai positif dan bisa juga bernilai negatif. Agar bisa berjalan dengan baik, perusahaan harus menyusun strategi dengan baik (Fahmi, 2011). Perusahaan perlu melakukan pengambilan keputusan untuk merencanakan apa yang akan dilakukan nantinya. Dalam pengambilan keputusan itu sendiri, perusahaan harus mengikut sertakan stakeholdernya di dalam struktur kepemilikan. Hal ini dikarenakan perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi pemegang saham/ pemilik (Sugiarto, 2009).

Penilaian kinerja keuangan perusahaan menurut (Fahmi, 2011) dapat dimanfaatkan Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya yang dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang dan memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan oleh manajer dan pemilik sebagai dasar penentuan kebijakan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

Penelitian terdahulu tentang struktur kepemilikan, struktur modal dan kinerja keuangan didalam penelitian Maftukhah (2013) struktur kepemilikan terhadap struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan dan di dukung Brigitta Petta dan Tarigan (2017), Kristianti (2018), Mujariyah (2016) sedangkan hasil berbeda diungkapkan pada penelitian Andati (2016) dan Thesarani (2017) bahwa sruktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap struktur modal dan kinerja keuangan perusahaan.

Dikarenakan adanya kontradiksi dan ketidaksamaan hasil penelitian yang telah disebutkan diatas, maka penelitian ini masih layak untuk dilakukan kembali. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil judul penelitian **“Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Struktur Modal Dan Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Bumn Go Publik Periode 2013-2017”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah struktur kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
2. Apakah struktur kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal
3. Apakah struktur modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan
2. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh struktur kepemilikan terhadap struktur modal
3. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi para pembaca serta menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya di

bidang *corporate governance* khususnya terkait struktur kepemilikan, struktur modal dan kinerja keuangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan masukan dan juga sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan guna lebih memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan , seperti struktur kepemilikan perusahaan serta struktur modal